



## Beli Garam pun Akan Diaudit BPK

### Balai Kota, Warta Kota

Ketua BPK Harry Azhar angkat bicara perihal berbagai kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemprov DKI atas laporan keuangan tahun 2014. Termasuk tentang kekesalan Ahok atas sikap BPK yang memeriksa uang operasionalnya hingga biaya pembelian sayur mayur dan cabai.

"Semua uang negara satu rupiah pun pasti kami periksa. Beli garam kalau pakai uang negara ya kami pe-

riksa. Beli apa-pun pakai APBD ya kami periksa," kata Harry, Selasa (7/7).

Mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu menegaskan, BPK tak

### Beli Garam...

akan memeriksa' pengeluaran yang berasal dari anggaran pribadi Ahok. "Ahok sebagai pribadi dan tidak mengambil uang APBD keluar Rp 10 miliar sekalipun, kami enggak bisa periksa. Tetapi kalau dia sebagai gubernur menggunakan satu rupiah saja uang negara, ya pasti kami periksa," kata Harry.

Sebelumnya, Ahok keşal karena BPK sampai memeriksa uang yang dipergunakan untuk membeli sayur. "Saya mau tanya operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabe dan

berasnya enggak?," tanya Ahok.

Ia meminta anggota BPK melakukan pembuktian harta terbaliik. Pernyataan Ahok itu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam UU itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai koruptor.

### Ahok panik

Sementara itu, Wakil DPRD

DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, protes Ahok seharusnya tak terjadi. Pasalnya, apapun hasil penilaian BPK, sudah melalui prosedur yang sebenarnya.

"Itu ciri-ciri orang panik. Padahal, apa yang dilakukan BPK adalah tugas negara. Ahok itu melakukan buang badan. Padahal kan seharusnya dia bertanggung jawab atas penilaian BPK," kata Taufik ketika dihubungi Warta Kota, semalam.

Dia menilai, Ahok tak memi-

liki kewenangan atas penilaian atau audit BPK. Terlebih, ketika membandingkan dengan masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo (Foke).

"Gubernur seharusnya bertanggung jawab. Beresin semua yang menjadi tupoksinya. Nggak usah komentar macam-macam. Dia nggak ada kewenangan menolak penilaian BPK. Dia juga gak bisa bandingin sama era Foke. Kenapa nggak sekalian saja, bandingin dengan zaman Ali Sadikin," kecam Taufik. (suf/kps)